
**PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MENINGKATAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Oleh

Asep Hidayat¹⁾, Wahidah Choerunnisa²⁾, Wahidahnisa³⁾, Zanindra Primahmudika⁴⁾**^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung****E-mail: ¹drasephi62@gmail.com, ²50503@gmail.com, ⁴zanindra12@gmail.com****Abstrak**

Pada era otonomi daerah saat ini, peran pemerintah daerah memberikan dampak yang cukup besar, hal ini dikarenakan pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk juga pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan potensi yang ada di daerah tersebut. Meskipun demikian, banyak kendala-kendala yang dialami pemerintah daerah dalam pembangunan ekonominya, misalnya ketidakseimbangan pembangunan sektor industri, kurang meratanya iklim investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang minim, perbedaan sumber daya alam, perbedaan keadaan demografis, dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Persoalan tersebut memberikan dampak pada pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan pendapat Arsyad (2000) yang menyatakan bahwa strategi pengembangan fisik, strategi pengembangan dunia usaha, strategi pengembangan dunia usaha, dan strategi pengembangan masyarakat. Strategi-strategi tersebut setidaknya membantu atau dapat dijadikan salah satu rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang ada pada persoalan-persoalan perekonomian di daerahnya agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi lebih meningkat dan pendapatan per kapita masyarakat juga bisa mengalami pertumbuhan atau kenaikan.(Djadjuli, 2018)

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Strategi, Pembangunan Daerah**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Pembangunan daerah ditujukan untuk mendayagunakan secara optimal potensi sumber daya alam dan memaksimalkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan daerah memiliki tiga ciri pokok yaitu dilaksanakan secara terpadu, meningkatkan swadaya masyarakat, dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.(Bappeda, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Daerah ini memanfaatkan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen melalui pendektan survey literatur akademik secara daring. Di mana peneliti mengakses google yang berisikan web lembaga kajian,

jurnal, artikel maupun report dan media masa terkait. (Suparman, 2021)

Metode penelitian deskriptif kualitatif ini dirasa dapat secara efektif menjawab pertanyaan secara menyeluruh dalam penelitian peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara daring dirasa sangat efektif mengingat situasi dan kondisi saat ini yang mengharuskan meminimalisir interaksi secara langsung dengan orang lain. Selain itu dapat mengefisienkan waktu serta meminimalkan terjadinya tumpang tindih informasi karena sudah banyak sekali kajian-kajian atau data informasi yang dapat diambil melalui daring.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan usaha dalam bentuk pemerintah daerah dan masyarakatnya mengendalikan sumber daya yang ada dan membangun suatu model kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam rangka mewujudkan lapangan kerja baru dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam cakupan wilayah tersebut. Persoalan utama dalam pembangunan daerah di antaranya terdapat pada pemusatan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilandaskan pada ciri daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan memanfaatkan keunikan sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan kelembagaan secara lokal. Hal inilah yang menghadapkan kita kepada pengambilan inisiatif yang bersumber dari daerah tersebut dalam upaya pembangunan demi mewujudkan kesempatan kerja baru dan memacu kenaikan usaha di bidang ekonomi. (Siwa, n.d.)

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu tahapan, yakni tahapan yang meliputi perancangan institusi baru, pembentukan industri alternatif, peningkatan

kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja yang ada dengan tujuan agar melahirkan produk dan jasa yang lebih baik, menelaah pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan penambahan jumlah perusahaan-perusahaan baru. Segala usaha pembangunan ekonomi daerah memiliki maksud utama untuk menaikkan jumlah dan jenis kesempatan atau peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam rangka untuk tercapainya tujuan tersebut. Pemerintah daerah dan masyarakatnya wajib bekerja sama dan bergotong-royong dalam menjalankan inisiatif pembangunan daerah. (Siwa, n.d.)

2. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

Sampai penelitian ini dibuat, belum ada teori yang mampu untuk mendefinisikan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun, terdapat beberapa teori yang secara Sebagian dapat mendukung kita untuk mengerti manfaat penting dari pembangunan ekonomi daerah. Pada dasarnya, inti dari pemikiran-pemikiran ini menyangkut pada dua hal, yaitu penjabaran yang berfokus tentang Teknik dalam menguraikan perekonomian suatu daerah dan pemikiran-pemikiran yang mengupas tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. (Siwa, n.d.)

a. Teori Ekonomi Neo Klasik

Kontribusi teori ekonomi Neo Klasik tidak signifikan dalam mengkaji pembangunan daerah (regional) disebabkan teori ini tidak terdapat dimensi spasial yang signifikan. Akan tetapi, teori ini mewariskan 2 konsep pokok dalam 4 pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Maksudnya, sistem perekonomian akan tercukupi keseimbangannya apabila modal bisa mengalir tanpa adanya pembatasan. Maka dari itu, modal akan berderai dari daerah yang memiliki upah tinggi mengarah ke daerah yang memiliki upah rendah. (Siwa, n.d.)

b. Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory)

Teori basis ekonomi mengutarakan bahwa pemicu penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berkaitan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari daerah lain. Pertumbuhan industri-industri yang memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan melahirkan kekayaan daerah dan mewujudkan *job creation* (peluang kerja baru). Kekurangan teori ini antara lain didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Akibatnya akan menghasilkan dependensi yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun internasional. Akan tetapi, teori ini sangat bermanfaat dalam menetapkan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang diperlukan masyarakat untuk mewujudkan ekonomi yang stabil. (Siwa, n.d.)

c. Teori Lokasi

Terdapat tiga faktor yang memberikan pengaruh pertumbuhan daerah menurut para ekonomi regional yaitu: lokasi, lokasi, dan lokasi! Pernyataan tersebut sangat relevan jika dihubungkan dengan pembangunan area industri. Perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengurangi biaya dengan cara memilih lokasi yang paling bagus peluangnya untuk menggapai pasar. Teori pembangunan industri kuno menjabarkan bahwa lokasi terbaik ialah biaya yang paling murah yang diukur dengan perbandingan antara bahan baku dengan pasar. (Siwa, n.d.)

Banyak variabel lainnya yang turut menyumbang pengaruh kualitas atau keseimbangan suatu lokasi contohnya upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan (diklat). Kekurangan dari teori lokasi ini jika digunakan pada

zaman sekarang yaitu bahwa teknologi dan komunikasi modern telah menggantikan pemahaman suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang. (Siwa, n.d.)

d. Teori Tempat Sentral

Teori ini beranggapan bahwa ada tingkatan tempat (*hierarchy of places*). Segala tempat sentral dijunjung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyajikan sumber daya (industri dan bahan baku). Tempat sentral itu adalah suatu pemukiman yang terdapat jasa-jasa bagi penduduk daerah yang membantunya. Teori tempat sentral ini dapat diaplikasikan dalam pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan ataupun di pedesaan. Contohnya, perlunya melakukan diferensiasi fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Suatu daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya hanya untuk daerah pemukiman. Seorang ahli pembangunan ekonomi 5 daerah bisa menolong masyarakat untuk meningkatkan kedudukan fungsional mereka dalam sistem ekonomi daerah. (Siwa, n.d.)

e. Teori Kausasi Kumulatif

Keadaan daerah-daerah sekitar kota yang memburuk mengindikasikan rancangan dasar dari tesis kausasi kumulatif (*cumulative causation*) ini. Kemampuan pasar yang kuat cenderung memperkeruh ketidakseimbangan antara daerah-daerah tersebut (maju versus terbelakang). Wilayah yang maju menanggung akumulasi keunggulan kompetitif dibandingkan daerah-daerah lainnya. Myrdal (1957) menyebut *backwash effect* adalah nama dari peristiwa ini. (Siwa, n.d.)

f. Model Daya Tarik (*attraction*)

Teori ini merupakan model pembangunan ekonomi yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang menjadi rujukannya yaitu bahwa suatu masyarakat bisa membenahi

posisi pasarnya terhadap industrialis dengan cara memberikan subsidi dan intensif. (Siwa, n.d.)

3. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Daerah

Peran pemerintah yang dapat dilakukan dalam pembangunan daerah diantaranya yakni:

a. Entrepreneur

Peranan pemerintah daerah sebagai entrepreneur yaitu dapat dilakukan dengan mendorong tumbuhnya perekonomian menggunakan bisnis melalui kebijakan kecil. Contoh melalui kebijakan kecil yakni, memberikan pelatihan serta bantuan berupa modal awal bagi UMKM atau pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya. (Amando Soares et.al, 2015). Selain itu pemerintah juga bertanggung jawab untuk membuka atau mengembangkan usaha bisnis berupa BUMD yang dapat menampung orang-orang yang akan mencoba berbisnis. Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis dapat menguntungkan. (Siwa, n.d.)

b. Koordinator

Peranan pemerintah daerah sebagai koordinator yaitu untuk mengkoordinir segala aktivitas di daerahnya serta merencanakan proses perubahan dalam pembangunan daerah tersebut, dengan cara bekerja sama atau menggandeng lembaga pemerintahan lain untuk mencapai tujuan tertentu. (Amando Soares et.al, 2015) Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perluasan dari peranan ini dalam pembangunan ekonomi bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran dan sebagainya. (Siwa, n.d.)

c. Fasilitator

Peranan pemerintah daerah sebagai fasilitator yaitu untuk memfasilitasi program dari perencanaan pembangunan daerah yang perlu melibatkan masyarakat sebagai partisipan yang disebut sebagai Bottom up Planning (perencanaan dari bawah). Peran pemerintah sebagai fasilitator juga dapat dibuktikan dengan dilaksanakannya program terkait sarana dan pra sarana yang sesuai dengan pedoman Plano Investemento Distrial (PID) sebab program pada pedoman tersebut telah disusun oleh pemerintah daerah dan komonitas masyarakat. (Amando Soares et.al, 2015). Alasan lain dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah ini yaitu perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) pada suatu daerah dapat mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih baik. (Siwa, n.d.)

d. Stimulator

Peranan pemerintah daerah sebagai stimulator yaitu dilakukan dengan cara tindakan-tindakan khusus bagi dunia usaha dimana hal itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan tersebut agar tetap eksis di daerahnya. Mulai dari memberikan bantuan dana hingga mempromosikan produk masyarakat melalui pameran dan beberapa media masa dan elektronik tentang sumberdaya-sumberdaya yang dikelola dan dimiliki daerah tersebut. (Amando Soares et.al, 2015). Dapat pula dengan cara lain yakni membantu pembuatan brosur- brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan outlets untuk produk- produk industri kecil, membantu industri-industri kecil melakukan pameran. (Siwa, n.d.)

4. Peran Masyarakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah

Peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah tercantum secara konstitusional dalam peraturan perundangan. Peran serta masyarakat ini merupakan kemitraan diantara para stakeholder khususnya pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses pembangunan yang dikenal dengan konsep “Public Private Partnership”. Hal yang paling mendasar yang perlu dilakukan untuk mencapai konsep tersebut adalah perlu dilakukan pengambilan “kekuatan” masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan. (Razak, 2013)

Bentuk interaksi pelaksanaan peran serta masyarakat untuk mencapai kemitraan tersebut dapat dijelaskan dalam tiga bentuk model yaitu :

- a. Model pertama menggambarkan situasi saat awal sejak era orde lama-orde baru dan transisi, dimana interaksi antara pemerintah-swasta begitu kuat sementara disisi lain masyarakat belum berdaya. Situasi ini menyebabkan interaksi pemerintah-swasta justru mendominasi sekaligus menentukan arah pembangunan. Disini masyarakat hanyalah sebagai obyek pembangunan masyarakat belum menjadi subyek pembangunan itu sendiri.
- b. Model kedua tahap ini memperlihatkan interaksi yang seimbang antara stakeholder, yaitu interaksi pemerintah-masyarakat-swasta interaksi ini dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi semua pihak bagaimana bergaul di lingkungan mejemuk dalam pengambilan keputusan. Semua pihak bisa belajar sehingga saling menghargai terutama adanya perbedaan pendapat dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Model ini merupakan metode partisipatif yang paling pas untuk diterapkan dalam pola interaksi. Model ini telah nampak diterapkan di era Abdurrahman Wahid, Megawati Sokarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono.
- c. Model ketiga adalah model yang paling ideal dari bentuk kemitraan pemerintah-

masyarakatswasta. Disini stakeholder sadar betul akan hak dan kewajibannya. Dalam model ini masyarakat tidak lagi harus terlibat langsung secara teknis dalam kontrak-kontrak pembangunan antara pemerintah swasta. Walaupun demikian masyarakat tetap mempunyai kekuatan dalam menentukan arah kontrak sendiri melalui mekanisme demokrasi dan transparansi. Dalam model ini masyarakat menjadi subyek pembangunan bukan lagi sebagai obyek pembangunan dan kedaulatan berada ditangan rakyat tetapi model ini belum dapat dilaksanakan di Indonesia karena peran serta masyarakat masih terabaikan. (Razak, 2013)

5. Strategi Pembangunan Daerah

- a. Strategi Pembangunan Seimbang
Istilah pembangunan seimbang itu diciptakan oleh Nurkse (1953). Strategi pembangunan seimbang bisa diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan (simultaneous) sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sector. (Siwa, n.d.). Contoh strategi pembangunan seimbang yakni terletak di kawasan Kabupaten Temanggung, dimana kawasan tersebut merupakan penghasil tembakau. Di sebut pembangunan seimbang karena di kawasan itu terdapat dua sektor yang saling menciptakan pasar di antara keduanya. Sektor pertanian menghasilkan tembakau dan sektor indrustri yang mengolah tembakau. Kedua sektor mempunyai hubungan yang saling menguntungkan. Di sisi lain pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai perencana dari strategi ini sangat mendukung petani tembakau, dari pencarian modal dan pemasaran tembakau. (Hermawan, n.d.)
- b. Strategi Pembangunan Tak Seimbang

Strategi pembangunan tak seimbang, menurut Hirschman, pembangunan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan (bottlenecks) atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya. Hal ini biasanya terjadi pada proses pembangunan dibidang ekonomi (Siwa, n.d.). Jika kita mengamati proses pembangunan yang terjadi antara dua periode waktu tertentu akan tampak bahwa berbagai sektor kegiatan ekonomi mengalami perkembangan dengan laju yang berbeda, yang berarti pula bahwa pembangunan berjalan dengan baik tidak seimbang. Contoh dari strategi pembangunan tak seimbang adalah freeport adalah industri pertambangan yang berada di kawasan papua, industri tambang emas ini di nilai lebih menguntungkan di bandingkan dengan sektor lain. Di sebut pembangunan tidak seimbang karena wilayah tersebut tidak unggul di sektor lain. Sementara dari sekian banyaknya investasi hanya mengumpul pada pertambangan emas ini. Bahkan pemerintah pusat mempunyai saham sebanyak 51% di industri pertambangan ini. Berbeda dengan industri lain yang tidak di perhatikan. (Hermawan, n.d.)

c. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Secara umum tujuan strategi pembangunan ekonomi daerah adalah memberikan kesempatan kerja untuk penduduk serta untuk mencapai stabilitas ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha (misalnya: lahan, sumber keuangan, infrastruktur, dan sebagainya yang beragam. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja masyarakat. Strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar yaitu

- strategi pembangunan fisik/lokalitas (Locality or Physical Development Strategy),
Contoh dari strategi pembangunan fisik ini salah satunya yakni penataan kota (townscaping) seperti, kemajuan di pusat-pusat perdagangan dengan memperbaiki sarana jalan raya, sarana pusat pertokoan (misalnya perbaikan tampilan maka pertokoan atau penetapan standar fisik bagi suatu bangunan pertokoan). pengembangan dunia usaha (Business Development Strategy),
Contoh dari pengembangan dunia usaha salah satunya yakni pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, meningkatkan daya saing terhadap produk-produk impor, dan meningkatkan sikap kooperatif antar sesama pelaku bisnis baik antara pemerintah maupun para petani.
- Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia (Human Resource Development Strategy).
Contoh strategi pengembangan SDM salah satunya yaitu pelatihan dengan sistem customized training. Sistem pelatihan seperti ini adalah sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan si pemberi kerja.
- Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Community-based Development Strategy).
Contoh melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi keuntungan dari usahanya sebagai bentuk pemanfaat masyarakat dalam ranah sosial

PENUTUP

Kesimpulan

Pengembangan adalah setiap usaha untuk memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memeberikan informasi, mempengaruhi sikap atau

menambah kecakapan. (Safri, 2016). Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan di berbagai bidang, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/Kota dan Desa. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. (Windusancono, 2008)

Itulah sebabnya menjadi penting bahwa pembangunan daerah memerlukan strategi perencanaan dan koordinasi yang terpadu, secara vertikal maupun horizontal, untuk mengantisipasi aliran externality secara spasial maupun akumulatif. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan daerah yang disusun tidak hanya dapat memberi panduan yang terarah dan efisien bagi pemecahan permasalahan tetapi lebih jauh memberi jaminan akan keberlanjutan sistem pembangunan dalam wilayahnya. (Windusancono, 2008)

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amando Soares et.al. (2015). Peranan Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4.
- [2] Bappeda, K. M. (2019). Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021. <http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/2019/07/rencana-strategis-badan-perencanaan-pembangunan-daerah-tahun-2016-2021/>
- [3] Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), hal. 10. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409>
- [4] Hermawan, H. (n.d.). *strategi_pembangunan_seimbang_dan_tidak*.
- [5] Razak, A. R. (2013). Peran serta masyarakat dalam pembangunan. *III*(1), 10–15.
- [6] Safri, H. (2016). PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. *Islamic Education Manajemen*, 1(1).
- [7] Siwa, H. F. D. (n.d.). Strategi Pembangunan Ekonomi Derah. 1–11.
- [8] Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31–42. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261>
- [9] Windusancono, B. A. (2008). Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal*, April, 65–81. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/download/2170/1471>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN